

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi dan informasi yang semakin berkembang dan terbuka menghasilkan masyarakat yang semakin terdidik serta cerdas dalam menerima dan menanggapi isu-isu terkini terutama dalam lingkup pemerintahan. Keterbukaan wawasan serta mudahnya informasi masuk kepada masyarakat menjadikan tuntutan terhadap pemerintahan yang baik semakin meningkat (Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati : 2014). Masyarakat yang semakin teredukasi tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memberikan kualitas yang terbaik yang bisa diberikan. Seiring dengan keinginan masyarakat untuk menciptakan *good governance* yang terbebas dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang sudah menjadi suatu budaya di Negara Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan

pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal.

Untuk mewujudkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas tentunya tidak lepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami serta kompeten dalam akuntansi pemerintahan. Sejauh ini masih banyak aparatur pemerintah daerah yang belum kompeten, serta mengabaikan norma-norma, etika, dan aturan administrasi pelayanan yang baik. Indikasinya adalah penyalahgunaan kewenangan. Maka dari itu disusun peraturan perundang-undangan pada bidang keuangan negara yang telah dikeluarkan berbagai aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah antara lain: Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sudah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah dikeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Setiap tahun Badan Pengawasan keuangan (BPK) akan memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah dan memberikan penilaian berupa opini terhadap setiap laporan tersebut serta mengelompokan Laporan Keuangan mana saja yang telah memiliki informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Opini yang diberikan oleh BPK untuk Laporan Keuangan yang telah diperiksanya adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar) serta TMP (Tidak Memberikan Pendapat/*Disclaimer*).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017, BPK memeriksa 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Dari pemeriksaan yang dilakukan BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 378 (70%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 141 (26%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 (4%) LKPD.

Tabel 1.1
Opini LKPD Tahun 2016

LKPD Tahun 2016		
Opini	Angka	Persentase
WTP	378	70%
WDP	141	26%
TMP	23	4%

(sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017)

Apabila dilihat secara lebih menyeluruh, opini LKPD dalam 5 tahun terakhir (2012-2016) mengalami perbaikan. Hal itu dapat dilihat dari tabel 1.1 yang diambil dari website BPK dan diringkas kembali oleh penulis. Berikut

adalah tabel yang menggambarkan perkembangan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Tahun 2012-2016. (www.bpk.go.id – IHPS II 2017)

Tabel 1.2
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016 Tingkat Pemerintah Daerah

TAHUN	OPINI BPK								JUMLAH
	WTP	PERSEN TASE	WDP	PERSENTASE	TMP	PERSEN TASE	TW	PERSEN TASE	
2012	120	23%	319	61%	79	15%	6	1%	524
2013	156	30%	311	59%	46	9%	11	2%	456
2014	251	50%	230	46%	19	4%	4	1%	504
2015	312	58%	187	36%	30	5%	4	1%	533
2016	378	70%	141	26%	23	4%			542

(sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017)

Adapun fenomena yang terjadi tentang kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat dimana kelima kalinya Pemkab Bandung Barat mendapatkan opini WDP (2012-2016), penyebab gagalannya Pemkab meraih opini WTP pada LKPD tahun 2016 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni soal pengelolaan aset. Selain itu, masalah lainnya, yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di tingkat SD dan SMP serta piutang Pajak Bumi dan Bangunan. Sejumlah aset tersebut sebagian besar merupakan limpahan dari daerah induk, yakni Kabupaten Bandung. Kepemilikan aset daerah saat ini hanya berpegang kepada surat pelimpahan aset dari Kabupaten Bandung. Direktur Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan KBB Kholid Nurjamil menilai, gagalannya Pemkab meraih WTP menunjukkan tidak adanya progres yang dilakukan Pemkab terhadap rekomendasi-rekomendasi BPK sebelumnya. (Cecep Wijaya Sari, 2017)

Kurangnya Tenaga Akuntan yang Kompeten pada Kabupaten/Kota yang meraih opini WDP (Kota Bandung, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat). Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar Arman Syifa menilai akuntan mempunyai peran penting dalam pembukuan keuangan pemerintah daerah. Ia meminta daerah yang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk menambah tenaga akuntan. Menurutnya langkah yang dilakukan Pemprov Jabar dengan mempekerjakan puluhan akuntan untuk pembukuan keuangan patut dicontoh. Hasilnya sangat signifikan dengan raihan tujuh kali beruntun opini WTP dari BPK RI. (Mukhlis Dinillah, 2018.).

Fenomena lain terkait pergantian sistem akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual. Tahun 2016 merupakan tahun pertama pemeriksaan laporan keuangan pemda dengan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, namun ternyata masih banyak masalah dan tantangan yang dihadapi. Karena hampir seluruh pemda ternyata belum siap 100 persen menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual ini. Padahal menurut Bupati Bandung Barat kala itu, H. Abubakar, ada banyak manfaat yang bisa diterima pemda dengan diaplikasikannya sistem ini, seperti memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemda, menyajikan terkait posisi hak dan kewajiban pemda dalam pengelolaan keuangan serta menyajikan informasi yang lebih berkualitas tentang kinerja pemda (Oche, 2016).

Salah satu permasalahan mendasar penyebab terjadinya LKPD yang tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan daerah masih ada yang kurang kompeten. Ini

diartikan bahwa belum adanya kesadaran dari tiap-tiap individu yang berada dilingkungan pemerintah daerah untuk berkomitmen terhadap *good governance* (Gumilar, 2013).

Betapa pentingnya penyajian laporan keuangan yang baik dan berkualitas bagi Pemerintahan karena hal ini terbukti dapat menjadi tolak ukur kesuksesan pemerintah dalam mengelola anggarannya. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie, 2011).

Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang Pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Dewi dan Yusrawati, 2015). Ketidakhahaman Pegawai tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000

Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam jabatan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Komponen Laporan Keuangan Berbasis Akrual

1.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (SAL);
3.	Neraca;
4.	Laporan Operasional (LO);
5.	Laporan Arus Kas (LAK);
6.	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7.	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(Sumber : PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP))

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan

basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Perubahan atas sistem dan basis akuntansi dilakukan untuk mendapatkan laporan keuangan yang handal, relevan, dapat dipercaya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Pemahaman akan sistem akuntansi merupakan suatu hal yang penting karena tidak mungkin laporan keuangan dikategorikan berkualitas jika dalam proses pembuatannya tidak mengikuti sistem akuntansi yang sesuai, seperti yang diungkapkan Bastian (2010:4) bahwa jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ditempatkan dalam upaya mencapai komputerisasi dalam organisasi pemerintah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (Entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang andal dan kurang relevan untuk membuat keputusan (Mardiasmo, 2009).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Andini dan Yusrawati (2015) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian, peneliti meneliti di SKPD Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan, sedangkan penulis meneliti di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Selain itu peneliti melakukan penelitian pada tahun 2015, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2018.

Penelitian lain yang terkait dengan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan Keuangan Daerah. Antara lain, Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014) yang berjudul “Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah” dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian, peneliti meneliti di Kabupaten Buleleng sedangkan penulis meneliti di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, kemudian terdapat perbedaan dalam variabel penelitian yaitu penulis tidak menggunakan penerapan SAP. Selain itu peneliti melakukan penelitian pada tahun 2014, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Dicky Rahman (2015) yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian, peneliti meneliti di SKPD Provinsi Riau sedangkan penulis meneliti di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, kemudian terdapat perbedaan dalam variabel penelitian yaitu penulis tidak menggunakan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu peneliti melakukan penelitian pada tahun 2015, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Rahmadani (2015) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian, peneliti meneliti di Kabupaten Pasaman

Barat sedangkan penulis meneliti di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, kemudian terdapat perbedaan dalam variabel penelitian yaitu penulis tidak menggunakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern. Selain itu peneliti melakukan penelitian pada tahun 2015, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Artika (2016) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian, peneliti meneliti di Kabupaten Rokan Hulu sedangkan penulis meneliti di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, kemudian terdapat perbedaan dalam variabel penelitian yaitu penulis tidak menggunakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern. Selain itu peneliti melakukan penelitian pada tahun 2016, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH”**

1.2 Identifikasi masalah dan rumusan masalah

1.2.1 Identifikasi masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah kurang kompetennya sumber daya manusia (SDM) terutama bagian keuangan yang menyebabkan kurang berkualitasnya laporan keuangan yang dihasilkan serta sistem akuntansi keuangan daerah yang belum baik sehingga menjadikan laporan keuangan menjadi buruk.

1.2.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan maka penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

4. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
5. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di Indonesia pada khususnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam bidang sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama yaitu tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk pertimbangan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah daerah mengenai masalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Bagi pihak lain

Sebagai bahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan Penelitian pada beberapa SKPD di Kabupaten Bandung Barat. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juli 2018 sampai dengan selesai untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan untuk penyusunan skripsi.